

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penerapan *whistleblowing system* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi secara keseluruhan sudah menunjukkan keefektifannya.

1. Penerapan *whistleblowing system* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi telah efektif memenuhi lima unsur *Good Government Governance* terlihat dengan adanya media pelaporan yang mudah diakses serta terciptanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengaduan.
2. Penerapan *Whistleblowing system* sebagai upaya penegakan Integritas pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi telah menunjukkan keefektifannya terlihat dalam berbagai bentuk upaya dalam membentuk integritas yang telah tercipta dalam suatu lembaga.
3. Penerapan *whistleblowing system* sebagai upaya pemberantasan korupsi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi telah menunjukkan keefektifannya terlihat dalam berbagai bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan serta dengan adanya kerjasama antara pihak ketiga yaitu Inspektorat Kota Bekasi telah efektif sebagai bentuk independensi pengelola laporan agar tetap terjaga dan kerahasiaan pelapor lebih terjaga.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dalam hal penelitian yaitu:

1. Akses yang dimiliki untuk lebih mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Hal tersebut dikarenakan topic yang diangkat dalam penelitian ini tergolong sensitif.
2. Waktu dalam perizinan surat penelitian membutuhkan waktu yang sangat lama dikarenakan adanya disposisi surat.

5.3. Saran

5.3.1 Saran untuk Instansi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk keberlangsungan perusahaan dalam mengimplementasi *Whistleblowing System*. Saran dari peneliti antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dapat menggunakan sosialisasi yang lebih interaktif melalui pemaksimalan media sosial DPMPTSP sehingga bagi karyawan atau pihak luar yang mengikuti bisa mendapatkan informasi secara cepat. Dan juga DPMPTSP dapat memberbanyak frekuensi sosialisasi dengan metode tatap muka dengan memperluas grade karyawan yang diikutsertakan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi juga dapat membuat sosialisasi yang lebih interaktif, misalnya dengan membuat video animasi mengenai kebijakan *Whistleblowing System* yang dapat dicantumkan pada website instansi agar lebih menarik calon *whistleblower*.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi bisa menambahkan media penyampaian pelaporan seperti melalui aplikasi di handphone. Karena tidak dipungkiri pada era digitalisasi seperti sekarang, orang-orang tidak lepas dari penggunaan handphone. Peneliti yakin dengan diciptakannya aplikasi *Whistleblowing System* DPMPTSP untuk handphone akan lebih mendorong calon *whistleblower* melakukan pelaporan karena dengan kemudahan penggunaannya.

3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dapat mulai mengatur masalah pemberian reward bagi *whistleblower*. Minimal dengan pemberian penghargaan berupa piagam, kalau instansi tidak ingin memberikan *reward* berupa uang tunai. Karena dengan adanya pemberian reward akan mendorong calon *whistleblower* melakukan pelaporan, sebab mereka merasa usaha pelaporan dihargai dengan adanya pemberian.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi dapat membuat kebijakan perlindungan pelaporan secara resmi khusus instansi.

5.3.2 Saran untuk Penelitian Berikutnya

Berdasarkan keterbatasan yang telah peneliti jabarkan pada poin diatas, peneliti mengusulkan beberapa saran yang diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Peneliti disarankan untuk dapat meyakinkan narasumber pada saat wawancara berlangsung, dengan cara peneliti menyatakan bahwa semua data yang didapat tidak dapat disalahgunakan. Dengan timbulnya keyakinan dari narasumber, mereka akan lebih leluasa untuk memberikan informasi yang lebih mendalam.
2. Peneliti diharapkan merencanakan lebih dari satu calon narasumber didalam setiap pos informasi yang ingin kita dapatkan. Untuk mengantisipasi narasumber yang dihubungi tidak berkenanan.
3. Peneliti disarankan mempersiapkan perizinan surat dari jauh hari untuk menghindari lamanya waktu disposisi surat prizinan penelitian dari instansi pemerintahan.
4. Peniliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut pada Inspektorat Daerah untuk mengetahui *whistleblowing system* lebih mendalam.